



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMI SUZANA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 462934

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.020.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/84 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/64 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 233.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA SUV Tahun 2016, WARISAN Rp. 100.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VE11 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 43.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	261.721.993
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.557.721.993
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.557.721.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.